

POLA PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pathuddin

Universitas Tadulako, Jl. Soekarno-Hatta Palu Sulawesi Tengah

e-mail: pathuddin@yahoo.com

Abstract: Curriculum Development Unit Level Pattern Of Education In Central Sulawesi Province. With the social-cultural conditions in immeasurable Central Sulawesi will need adjustment of development of more special Education Unit Level Curriculum . So the problems which is studied in this research is: “ How is the Development pattern of Education Unit Level Curriculum in Central Sulawesi?”. From the main problems, the study will focus on the analysis of several aspects, that are: (1) How does the policy direction of the implementation of Education Unit Level Curriculum in the Central Sulawesi? (2) How is the understanding of the principal, teachers and school committees to develop curriculum? (3) What are the problems faced by schools in developing Education Unit Level Curriculum?. The technique that is used to obtain data, are (1) Study Documents, (2) observation, (3) Interview and (4) polls. The result shows that the local excellence that is wanted to develop by the City and District Education Office is the local language, local arts, skills and crafts area. Application of Education Unit Level Curriculum has been implemented since the academic year 2006/2007. The principals understanding about curriculum development guidelines that is issued by the BSNP is still low. This condition makes a lot of teachers and principals are still having problems in developing Education Unit Level Curriculum. The problem that is experienced by teachers is the difficulty to develop syllabus materials and lesson plans in accordance with local conditions. The problem that is experienced in developing local content is the lack of teachers who understand the social-cultural conditions in Central Sulawesi. Some suggestions that is recommended is a need for training for principals and teachers, development of syllabus materials and lesson plans. Center for Research and Education Ministry curriculum still needs to socialize guide curriculum development. So in the network curriculum include the team members from the college in accordance with the groups of subjects.

Abstrak: Pola Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan kondisi sosial budaya di Sulawesi Tengah yang beragam akan memerlukan penyesuaian pengembangan KTSP yang lebih khusus. Sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pola Pengembangan KTSP di Sulawesi Tengah?”. Dari permasalahan pokok tersebut, maka studi ini akan memfokuskan pada analisis terhadap beberapa aspek, yakni ; (1) Bagaimana arah kebijakan implementasi KTSP di Sulawesi Tengah? (2) Bagaimana pemahaman kepala sekolah, guru dan komite sekolah terhadap pengembangan KTSP? (3) Apa permasalahan yang dihadapi sekolah dalam mengembangkan KTSP?. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data, adalah (1) Studi Dokumen, (2) Observasi, (3) Wawancara dan (4) Angket. Hasil penelitian menunjukkan keunggulan lokal yang ingin dikembangkan Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten adalah bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah. Penerapan KTSP telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2006/2007. Pemahaman kepala sekolah tentang panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP masih rendah hal ini berdampak pada sebahagian besar guru dan kepala sekolah masih mengalami masalah dalam mengembangkan KTSP. Masalah yang dialami guru adalah sulitnya mengembangkan materi Silabus dan RPP sesuai dengan kondisi daerah. Permasalahan yang di alami dalam mengembangkan muatan lokal adalah tidak adanya guru yang memahami kondisi sosial budaya di Sulawesi Tengah. Beberapa saran yang rekomendasikan berupa perlunya pelatihan bagi kepala sekolah dan guru, mengembangkan materi Silabus dan RPP. Pusat kurikulum Balitbang Depdiknas masih perlu mensosialisasikan panduan pengembangan kurikulum. Agar dalam jaringan kurikulum memasukkan anggota tim dari perguruan tinggi yang sesuai dengan kelompok mata pelajaran.

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan, Pengembangan KTSP

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; (c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kelompok mata pelajaran estetika; dan (e) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Dari kelompok mata pelajaran terdiri dari beberapa mata pelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.

Hal tersebut memenuhi Undang-undang No. 20/2003, Pasal 36 (2), kurikulum dikembangkan secara berdiversifikasi dan amanat PP 19/2005 kurikulum dikembangkan oleh satuan pendidikan (sekolah) dengan mengacu Standar Isi, yang tertuang dalam Permendiknas No. 22/2006, dan Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan, yang tertuang dalam Permendiknas No. 23/2006, dan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berdiversifikasi merupakan tantangan besar bagi sekolah. Jika selama ini kurikulum disusun secara lengkap oleh pemerintah dan sekolah tinggal menerapkan, di masa sekarang dan seterusnya sekolah dituntut mampu mengembangkan kurikulum sendiri. Hal ini merupakan implikasi dari keseluruhan pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia yang didasarkan pada berbagai perundangan yang telah ditetapkan, antara lain UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bab III Pembagian Urusan Pemerintahan Pasal 14 Ayat 1 yang menegaskan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah/Kota antara lain pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Tuntutan utama dari pendekatan desentralistik adalah tuntutan kemampuan setiap pengembang kurikulum yang harus menyebar dari tingkat pusat, daerah, sampai pada tingkat satuan pendidikan di sekolah. Kebijakan tersebut menuntut sekolah untuk mampu menjabarkan standar isi yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi kurikulum yang diyakini cocok dengan situasi dan kondisi sekolah yang bersangkutan dan pelaksanaannya

mampu mengantarkan peserta didik mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang ditandatangani pada 23 Mei 2006 mengesahkan KTSP, dan akan mulai diterapkan pada 2006/2007. Dengan pemberlakuan KTSP, pemberdayaan guru pun akan lebih baik. Sebagai contoh, guru yang selama ini hanya mengajar karena kurikulumnya sudah tersedia, akan dituntut memiliki kemampuan menyusun kurikulum yang sesuai dan tepat bagi peserta didiknya.

Berdasar fakta empiris, Sekolah dan Komite Sekolah belum semuanya memiliki sumber daya manusia yang memadai, sehingga belum semua Sekolah dan Komite Sekolah atau Madrasah dan Komite Madrasah mampu menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Silabusnya.

Kesenjangan yang selama ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya pemahaman implementasi kurikulum pada tingkat daerah dan satuan pendidikan sehingga pada saat daerah diberi wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi lingkungan dan sumber daya pendidikan di masing-masing daerah, tim pengembangan kurikulum daerah cenderung menanti petunjuk pelaksanaan dari pusat.

Kebijakan yang diambil Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas adalah dengan membentuk Jaringan Kurikulum sebagai suatu wadah yang dapat menjembatani kesenjangan antara pusat dan daerah. Jaringan Kurikulum di daerah memiliki dua fungsi; (1) Sebagai tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal, (2) Memberi bantuan teknis baik kepada lembaga pendidikan maupun perorangan dalam rangka pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi kurikulum di daerah (Hudojo, 2003). Jaringan Kurikulum di daerah dapat disepadankan sebagai motor penggerak dalam pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi kurikulum yang berjalan di daerah.

Dalam pembentukannya, struktur organisasi jaringan kurikulum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah. Kriteria personil dari unsur-unsur Jaringan Kurikulum terdiri atas: (1) Pakar Perguruan Tinggi dengan latar belakang pendidikan bidang Kurikulum, Teknologi Pendidikan, Bimbingan Konseling, (2) Pengawas yang memiliki pengalaman mengawas minimal 3 tahun, (3) Kepala Sekolah dengan pengalaman minimal 3 tahun, dan (4) Guru dengan pengalaman mengajar minimal 8 tahun.

Disadari bahwa implementasi pengembangan KTSP di setiap jenjang pendidikan di Sulawesi Tengah sampai saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan

karena beberapa sekolah dan komite sekolah belum memahami tentang KTSP, bahkan ada komite sekolah yang justru memberatkan sekolah bukan memperlancar dan meningkatkan mutu sekolah. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas dengan membentuk jaringan kurikulum masih perlu di evaluasi. Salah satu syarat komponen jaringan kurikulum dengan memasukkan komponen perguruan tinggi dalam jaringan kurikulum dengan latar belakang pendidikan kurikulum, teknologi pembelajaran dan bimbingan konseling (standar isi sulit dikembangkan) justru akan mempersulit setiap sekolah karena dalam KTSP terdiri dari beberapa mata pelajaran. Berdasarkan evaluasi sementara di lapangan khususnya di Kota Palu, beberapa guru mata pelajaran meminta adanya tenaga dari perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang ilmu disetiap mata pelajaran.

Masyarakat di Sulawesi Tengah terdiri dari suku Kaili (masyarakat daerah), Bugis, Makassar, Mandar dan Jawa. Dengan kondisi sosial budaya yang beragam akan memerlukan penyesuaian pengembangan KTSP yang lebih khusus. Sebagai contoh di Kota Palu bahasa daerah Kaili yang terdiri dari bahasa Rai, Tara, Ledo, Doi. Berdasarkan fenomena di atas maka penelitian ini memfokuskan pada pandangan guru, kepala sekolah, dan komite sekolah, terhadap pengembangan KTSP yang dijadikan sebagai dasar menentukan pola pengembangan KTSP sehingga dihasilkan KTSP sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di Sulawesi Tengah.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian berupa *ex post facto* dengan mendeskripsikan tentang pola pengembangan KTSP di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Penelitian *ex post facto* merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi (Sugiono, 2010)

Subyek Penelitian

Penelitian ini mengambil dua lokasi/ Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua

Kabupaten tersebut adalah Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada beberapa aspek, diantaranya sosial budaya masyarakat, ekonomi, serta sosialisasi KTSP yang telah di laksanakan oleh Diknas Kota Palu dan Diknas Kabupaten Donggala. Subyek penelitian adalah, Kepala Dinas Pendidikan Kota/kabupaten, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Guru.

Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : (a) Studi Dokumen: dokumen yang berisi hasil rekaman berbagai kegiatan atau data tentang kondisi sekolah, pendidikan, dan pengembangan guru di daerah sampel. (b) Observasi: yaitu peneliti berada di lokasi penelitian yang terpilih sebagai sampel penelitian. (c) Wawancara mendalam: teknik ini digunakan untuk merekam sekaligus mengorek berbagai keterangan yang berkaitan dengan pengembangan KTSP serta kegiatan persekolahan pada lokasi penelitian. Alat yang akan digunakan dalam wawancara, adalah buku catatan. (d) Angket: berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan informasi yang akan direkam dan bersifat umum. Angket ditujukan kepada responden yang dipilih secara random sederhana.

Semua data yang telah terkumpul melalui beberapa teknik pengumpulan data di atas, seperti data dari naskah tertulis yang terdokumentasi, catatan-catatan hasil wawancara dan observasi yang terdeskripsi dengan baik, ditata atau disusun kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang telah ditetapkan untuk dijadikan bahan analisis lebih lanjut.

Langkah kerja selanjutnya adalah mengorganisasikan data, memilah-milah dalam unit-unit, kemudian melakukan sintesis, menyusun pola-pola, mengungkapkan dimensi esensial dari temuan penelitian dan membuat deskripsi hasil penelitian.

Cara dan tahapan kerja sebagaimana dikemukakan di atas dilakukan dalam penelitian ini dengan membuat catatan-catatan lapangan yang formatnya telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya dibuatkan kode dan reduksi data serta penyajian data dalam bentuk deskriptif dan tabel untuk selanjutnya dianalisis dan diinferensikan lebih lanjut sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, ada tiga alur kegiatan yang dilakukan yakni; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan

dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis selama perekaman data di lapangan berlangsung (Moleong, 2006). Reduksi data dilakukan secara terus menerus yakni pada saat perekaman data di lapangan berlangsung, misalnya pembuatan ringkasan, kode, gugus, memo dan penelusuran tema, dan lain-lain. Proses reduksi data penelitian ini merupakan bagian dari langkah analisis untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi proses penarikan kesimpulan. Kegiatan mereduksi data pada penelitian ini untuk memilih dan memilah data pokok dan data pelengkap yang sesuai atau bertentangan dengan fokus penelitian ini.

Analisis Data

Data yang telah terpilah kemudian dituangkan dalam penyajian data berupa teks naratif, tabel, dan lain-lain, yang kemudian diselaraskan untuk melihat keterkaitannya antara data penelitian yang terkumpul dengan fenomena yang ada dan terkait dengan fokus penelitian. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian ini berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengembangan KTSP Kebijakan Dinas Pendidikan

Hasil angket dan wawancara tentang kebijakan dinas pendidikan kota dan kabupaten tentang pengembangan KTSP disajikan seperti berikut : (1) Dinas Kota Palu dan Kabupaten Donggala telah menerapkan KTSP sejak tahun ajaran 2006/2007. Langkah yang ditempuh dalam melaksanakan KTSP adalah dengan melakukan sosialisasi, pembentukan jaringan kurikulum dan pelatihan. Disamping itu dinas telah mengeluarkan

Surat Keputusan (SK) pemberlakuan KTSP untuk semua jenjang pendidikan. (2) Sejak tahun 2006 Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten telah melakukan sosialisasi beberapa kali yang dihadiri oleh guru, kepala sekolah, komite dan pegawai dinas pendidikan. Penataran dan workshop KTSP terlaksana dengan melibatkan kepala sekolah dan guru. (3) Sebagai wadah dalam menjembatani kesenjangan antara pusat dan daerah dinas pendidikan kota dan kabupaten telah membentuk Jaringan Kurikulum. Mekanisme pembentukan tim pengembang kurikulum dilakukan dengan rapat koordinasi dan dibuatkan SK. Tim pengembang kurikulum berasal dari dinas pendidikan dan dewan pendidikan serta komite sekolah. Kriteria anggota tim yang dibentuk adalah dewan pendidikan, guru dan kepala sekolah yang telah mengikuti TOT tingkat nasional. Kewenangan pengembangan kurikulum: pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah dan komite sekolah (Masitoh, 2012). (4) Program kerja yang dibuat berupa perencanaan pengembangan KTSP yang meliputi sosialisasi, pelatihan dan Evaluasi. Sumber dana kegiatan ini berasal dari dinas pendidikan kota dan kabupaten. (5) Keunggulan lokal yang ingin dikembangkan adalah bahasa daerah, kesenian daerah dan keterampilan dan kerajinan daerah.

Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Mengembangkan KTSP

Penerapan KTSP di beberapa sekolah diperoleh seperti pada Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa sebanyak 73,5% sekolah telah menerapkan KTSP sejak tahun ajaran 2006/2007. Sebanyak 9,4% yang belum menerapkan dan sisanya sebanyak 17,1% masih dalam perencanaan. Hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa penerapan KTSP yang dimaksudkan oleh responden adalah telah menyesuaikan dengan isi setiap materi mata

Tabel 2.1. Persentase Responden yang Telah Menerapkan KTSP

No	Pilihan	Daerah		Total (%)
		Palu (%)	Donggala (%)	
1	Sudah Menerapkan	83	61	74
2	Belum Menerapkan	6	14	9
3	Dalam Perencanaan	11	25	17
	Total	100	100	100

Tabel 2.2. Persentase Alasan Responden Belum Menerapkan KTSP

No	Alasan	Daerah		Total (%)
		Palu (%)	Donggala (%)	
1	Belum Diinstruksikan Dinas Pendidikan	9	15	13
2	Tidak Siap	18	5	10
3	Belum diinstruksikan Kepala Sekolah	0	5	3
4	Tidak Penting	0	0	0
5	Belum Memahami KTSP	73	75	74
Total		100	100	100

Tabel 2.3. Persentase Sumber Informasi KTSP

No	Sumber	Daerah		Total (%)
		Palu (%)	Donggala (%)	
1	Dinas Pendidikan	58	59	58
2	Kepala Sekolah	20	10	15
3	Pengawas	27	27	27
4	LPMP	21	33	26
5	Media Massa	6	8	7
6	Teman	9	10	9

Tabel 2.4. Persentase Responden Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan KTSP

No	Bentuk	Daerah		Total (%)
		Palu (%)	Donggala (%)	
1	Sosialisasi	79	78	79
2	Pelatihan	47	31	40
3	Bimbingan	65	45	56

Tabel 2.5. Asal Pembimbing

No	Pilihan	Daerah		Total (%)
		Palu (%)	Donggala (%)	
1	Dinas Pendidikan	51	41	47
2	LPMP	19	27	22
3	Perguruan Tinggi	2	0	1
4	Guru Senior	28	32	30
Total		100	100	100

pelajaran yang ada dalam contoh yang dikeluarkan oleh BSNP.

Beberapa alasan yang menyebabkan belum menerapkan KTSP adalah (1) Belum diinstruksikan oleh pihak Dinas Pendidikan, (2) Tidak siap, (3) Belum diinstruksikan kepala sekolah dan, (4) Belum memahami KTSP. Sebanyak 74% menyatakan belum

memahami KTSP dan sisanya 26% menyatakan belum diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan, tidak siap dan belum diinstruksikan kepala sekolah. (Tabel 2.2)

Data yang menyatakan bahwa mereka mengenal KTSP dari Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.6. Tanggapan Terhadap Pembimbing

No	Pilihan	Daerah		Total (%)
		Palu (%)	Donggala (%)	
1	Dapat membantu	88	83	86
2	Tidak dapat membantu	12	17	14
Total		100	100	100

Tabel 2.7. Alasan Pembimbing dapat Membantu

No	Pilihan	Daerah		Total (%)
		Palu (%)	Donggala (%)	
1	Materi dapat mempermudah	41	43	42
2	Sesuai dengan bidang Ilmu	20	24	22
3	Sering memberikan bimbingan	39	33	36
Total		100	100	100

Tabel 2.8. Bimbingan yang Diharapkan

No	Pilihan	Daerah		Total (%)
		Palu (%)	Donggala (%)	
1	Perumusan Visi dan Misi	30	39	34
2	Pembuatan Silabus	53	69	60
3	Pengembangan Materi	39	43	41
4	Pembuatan RPP	45	61	52
5	Metode Pembelajaran	35	31	33
6	Media Pembelajaran	32	31	32
7	Model Penilaian	42	39	41

Tabel 2.9. Muatan Lokal yang ingin Dikembangkan

No	Pilihan	Daerah		Total (%)
		Palu (%)	Donggala (%)	
1	Bahasa Daerah	24	25	25
2	Bahasa Inggris	39	53	45
3	Kesenian Daerah	11	18	14
4	Keterampilan dan Kerajinan Daerah	33	55	43
5	Adat Istiadat	0	16	7

Dari data tersebut terlihat sebanyak (58%), kepala sekolah (15%), pengawas (27%), LPMP (26%), media massa (7%), dan teman (9%). Kebanyakan responden mengenal KTSP dari Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten.

Program kerja yang dibuat Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten berupa perencanaan pengembangan KTSP yang meliputi sosialisasi dan pelatihan.

Tabel 2.4 memperlihatkan responden yang

pernah mendapat bimbingan atau pendampingan dalam menyusun KTSP sebanyak 56% dan sisanya 44% belum pernah mendapatkan bimbingan

Tabel 2.5 memperlihatkan sebanyak 47% responden mendapatkan bimbingan dari Dinas pendidikan, 30% dari guru senior dan 22% dari LPMP dan sisanya hanya 1 % dari perguruan tinggi.

Tabel 4.6 memperlihatkan tanggapan responden terhadap bantuan yang diberikan pembimbing sebanyak 86% menyatakan dapat membantu dengan

Tabel 2.10. Presentase Responden yang Telah Menyusun Perangkat KTSP

No	Pilihan	Daerah		Total (%)
		Palu (%)	Donggala (%)	
1	Telah Menerapkan	81	63	73
2	Belum Menyusun	19	37	27
	Total	100	100	100

Tabel 2.11. Presentase Responden yang Mengalami Masalah dalam Menyusun Perangkat KTSP

No	Pilihan	Daerah		Total (%)
		Palu (%)	Donggala (%)	
1	Mengalami Masalah	95	98	97
2	Tidak Mengalami Masalah	5	2	3
	Total	100	100	100

Tabel 2.12. Masalah yang Dialami dalam Menyusun Perangkat KTSP

No	Masalah	Daerah		Total (%)
		Palu (%)	Donggala (%)	
1	Belum paham tentang KTSP	23	49	32
2	Mengembangkan Standar Kompetensi	16	37	25
3	Mengembangkan Kompetensi Dasar	20	37	28
4	Menyusun RPP	16	37	25
5	Menyusun Silabus	28	47	37
6	Mengembangkan Media	31	18	25
7	Metode Pembelajaran	11	14	12
8	Memahami Kondisi Siswa	0	8	4
9	Alat Laboratorium	44	29	37
10	Mengembangkan Penilaian Kinerja	20	24	22

Tabel 2.13. Masalah yang Dialami dalam Menyusun Silabus dan RPP

No	Masalah	Perangkat	
		Silabus (%)	RPP (%)
1	Belum memahami komponen silabus	38	47
2	Sulit mengembangkan materi sesuai kondisi daerah	56	36
3	Sulit mendapatkan sumber belajar	32	33

alasan (1) materi dapat mempermudah, (2) sesuai dengan bidang ilmunya dan (3) sering memberikan bimbingan dan 14% menyatakan tidak dapat membantu.

Dari Tabel 2.7 dapat dilihat Sebanyak 42% yang menyatakan materi dapat mempermudah, 22% karena sesuai dengan bidang ilmunya dan 36% karena sering membimbing. Sedangkan Materi bimbingan yang diharapkan responden dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Dari Tabel 2.8 terlihat materi bimbingan yang sangat diharapkan adalah pembuatan silabus dan pembuatan RPP.

Tabel 2.9 memperlihatkan muatan lokal yang ingin dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah sangat bervariasi. Responden ingin mengembangkan bahasa Inggris sebesar 45% dan keterampilan dan kerajinan daerah sebesar 43% dan bahasa daerah sebesar 25%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten menyatakan

bahwa muatan lokal yang dikembangkan berupa, bahasa daerah, kesenian daerah dan keterampilan dan kerajinan daerah. Namun beberapa sekolah yang agak berbeda dengan sekolah lainnya yang mengembangkan muatan lokal seperti pertanian, bahasa mandarin, agama, lingkungan, elektronika, dan pengolahan pupuk kandang.

Permasalahan yang dihadapi Oleh Sekolah dalam Mengembangkan KTSP

Data responden yang telah menyusun perangkat KTSP sebanyak 73% dan 27% yang belum menyusun seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.10.

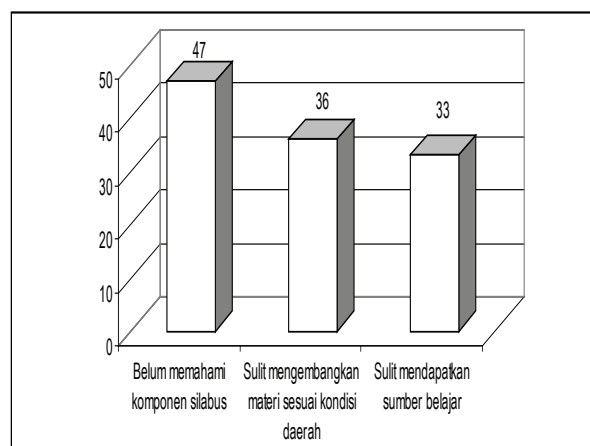
Tabel 2.11 memperlihatkan responden yang mengalami masalah dalam menyusun Perangkat KTSP sebesar 97%.

Beberapa masalah yang dialami dalam menyusun perangkat KTSP seperti pada Tabel 4.12 adalah karena responden belum memahami KTSP, seperti menyusun silabus, alat-alat laboratorium belum memadai, kemampuan mengembangkan standar kompetensi, kompetensi dasar, menyusun RPP, mengembangkan media, metode pembelajaran, memahami kondisi siswa, dan mengembangkan penilaian kinerja. Masalah yang dialami dalam menjabarkan kompetensi dasar dan standar kompetensi adalah sulitnya menyesuaikan dengan standar isi, sulit menghubungkan antara standar kompetensi dengan kompetensi dasar serta sulit menyusun alat penilaiannya. Berdasarkan hasil wawancara sebahagian responden kesulitan membuat perangkat penilaian untuk menilai aspek psikomotor dan afektif.

Masalah yang dialami dalam mengembangkan silabus adalah sulitnya mengembangkan materi sesuai kondisi daerah. Sedangkan berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi sesuai kondisi daerah (Depdiknas, 2005). Tabel 2.13 memperlihatkan bahwa sebahagian besar responden (56%) sulit mengembangkan materi sesuai dengan kondisi daerah.

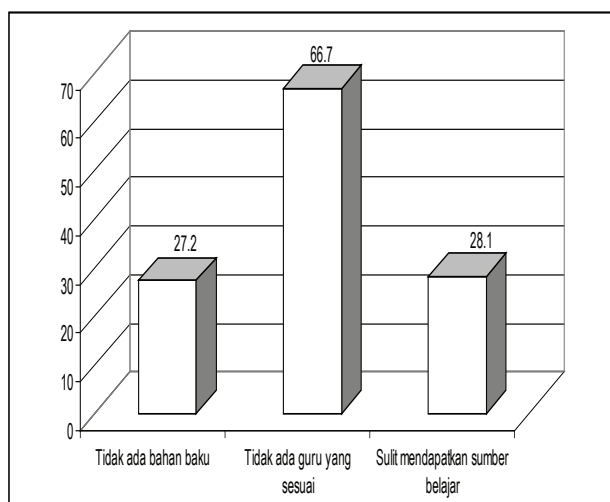
Dalam mengembangkan RPP sebahagian besar responden belum memahami komponen RPP (47%). Berdasarkan hasil wawancara

sebahagian besar responden membuat Silabus dan RPP hanya mengikuti contoh yang pernah diberikan saat sosialisasi, sehingga isinya tidak sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Gambaran tentang masalah dalam mengembangkan silabus dan RPP dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Grafik masalah yang dialami dalam mengembangkan RPP

Masalah lain yang dialami adalah dalam mengembangkan muatan lokal yang sesuai dengan kondisi daerah Sulawesi Tengah, tidak adanya bahan baku, tidak ada guru yang sesuai dan sulitnya mendapatkan sumber belajar. Faktor yang paling dominan adalah tidak adanya guru yang sesuai atau (66,7%) selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2. Dalam mengembangkan muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah serta adat istiadat sangat sulit mendapatkan guru yang sesuai hal ini disebabkan karena perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah belum memiliki program studi yang mengkaji tentang kebudayaan, kesenian dan bahasa daerah.



Gambar 2. Grafik masalah yang dialami dalam mengembangkan Muatan Lokal

Beberapa saran dari guru berkaitan dengan masalah yang dialami adalah :

1. Masih perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan yang mengarah pada pembuatan perangkat KTSP, terutama silabus dan RPP.
2. Pembimbing ada dari perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi masing-masing.
3. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah perlu dilengkapi seperti buku paket dan alat-alat laboratorium
4. Perlu ada upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) guru.
5. Kurikulum jangan terlalu sering dirubah karena dengan berubahnya kurikulum maka guru harus lagi membuat perangkat kurikulum yang baru.

Pemahaman Kepala Sekolah, dan Guru tentang Pengembangan KTSP

Saat ini para guru mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum di tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum yang merupakan produk dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) itu disusun berdasarkan dua standar. Yakni, standar isi dan standar kompetensi lulusan, yang keduanya telah disusun dan diterapkan pada tahun 2006 lalu.

Berdasarkan hasil angket pemahaman tentang isi panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP diperoleh bahwa pemahaman kepala sekolah dan guru masih rendah yaitu dengan rata-rata skor 55,2 dengan skala 0 - 100. Tabel

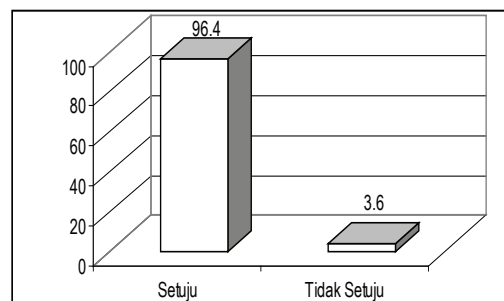
2.13 memperlihatkan tingkat pemahaman kepala sekolah dan guru tentang panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP. Pada Gambar tersebut terlihat bahwa tingkat pemahaman kepala sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan guru. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena kepala sekolah lebih sering mengikuti sosialisasi dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

Tabel 2.13. Rata-rata Pemahaman Responden Tentang Panduan KTSP

Responden	Nilai rata-rata
Kepala Sekolah	56.2
Guru	54.5
Rata-rata	55.2

Keterlibatan Komite Sekolah terhadap Pengembangan KTSP

Gambar 3 menunjukkan pendapat komite tentang pemberlakuan KTSP. Pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa sebanyak 96,4% responden menyatakan setuju dengan pemberlakuan KTSP. Upaya yang dilakukan dinas pendidikan untuk memperkenalkan KTSP melalui sosialisasi dan pelatihan, namun dari sejumlah responden, hanya 41,1% yang pernah mengikuti sosialisasi dan sebanyak 21,4% yang pernah mengikuti pelatihan. Hal ini didukung oleh data bahwa sebahagian besar komite sekolah mengenal KTSP dari kepala sekolah bukan dari dinas pendidikan. Dari sejumlah komite yang pernah mengikuti sosialisasi dan pelatihan adalah anggota komite yang merangkap sebagai guru.



Gambar 3. Grafik pendapat komite sekolah tentang pelaksanaan KTSP

Seperti yang diamanatkan dalam buku panduan

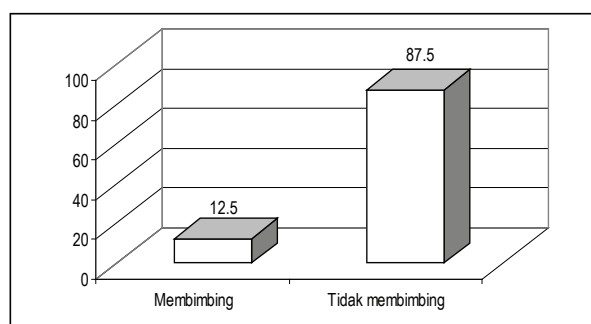
pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP bahwa yang terlibat dalam penyusunan KTSP salah satunya adalah komite sekolah (Masitoh, 2007). Namun berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 34% responden yang terlibat dalam penyusunan KTSP.

Tabel 2.14. Keterlibatan Komite Sekolah dalam Mengembangkan KTSP

No	Bentuk	Total (%)
1	Menyusun Visi dan Misi	48
2	Menetapkan standar kelulusan	12
3	Menetapkan standar isi	9
4	Mengembangkan bahan ajar	3
5	Menandatangani dokumen KTSP	24
6	Menetapkan pemberlakuan KTSP	3

Bentuk keterlibatan komite sekolah adalah merumuskan visi dan misi sekolah, menetapkan standar kelulusan, menetapkan standar isi, mengembangkan bahan ajar, menandatangani KTSP dan menetapkan pemberlakuan KTSP (Sanjaya, 2007). Dari bentuk keterlibatan tersebut sebahagian besar responden dilibatkan dalam menyusun visi dan misi sekolah dan ikut menandatangani KTSP.

Selain terlibat dalam penyusunan KTSP komite juga berhak ikut membimbing dalam menyusun KTSP, namun dari data yang diperoleh sebahagian besar komite (87,5%) tidak terlibat dalam hal tersebut.



Gambar 4. Grafik keterlibatan komite membimbing pengembangan KTSP

Alasan yang diberikan oleh komite adalah karena selain tidak memahami KTSP dan tidak sesuai dengan bidang ilmunya juga karena tidak dilibatkan. Beberapa komite mengharapkan agar peserta didik memahami pelajaran sehingga pendidikan lebih maju

dan berkualitas dengan pemberlakuan KTSP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisa data dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Dan Kabupaten dalam membentuk jaringan kurikulum belum sepenuhnya sesuai dengan panduan mengembangkan jaringan kurikulum yang dikeluarkan oleh pusat kurikulum Balitbang Depdiknas.
2. Syarat anggota jaringan kurikulum ditingkat kota dan kabupaten di Sulawesi Tengah adalah bagi yang pernah mengikuti TOT tingkat Nasional dan belum ada anggota dari perguruan tinggi sebagai unsur masyarakat
3. Pemahaman Kepala Sekolah dan Guru tentang panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan BSNP masih rendah
4. Masih banyak guru dan kepala sekolah mengalami masalah dalam mengembangkan kurikulum KTSP terutama dalam membuat Silabus dan RPP.
5. Masalah yang dialami dalam mengembangkan Silabus dan RPP adalah sulitnya mengembangkan materi sesuai kondisi daerah dan kurangnya sumber belajar.
6. Masalah yang dialami sekolah dalam mengembangkan muatan lokal adalah tidak adanya guru yang sesuai.

Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil kesimpulan dan pembahasan maka dalam peneliti memberikan saran dan rekomendasi berupa :

1. Agar Dinas Pendidikan Kota Dan Kabupaten dalam membentuk jaringan kurikulum menyesuaikan dengan panduan mengembangkan jaringan kurikulum yang dikeluarkan oleh pusat kurikulum Balitbang Depdiknas.
2. Agar anggota jaringan kurikulum ditingkat kota dan kabupaten di Sulawesi Tengah memasukkan tim dari perguruan tinggi untuk setiap bidang studi sehingga kesulitan guru dalam mengembangkan Silabus dan RPP dapat diatasi. Pendamping dari setiap bidang studi di Perguruan Tinggi membantu guru dalam kegiatan MGMP.
3. Agar pusat kurikulum balitbang Depdiknas memberikan pemahaman kepada Kepala Sekolah

- dan Guru tentang panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan BSNP.
4. Agar diadakan pelatihan tentang pengembangan Silabus dan RPP bagi kepala sekolah dan guru.
 5. Agar Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten memberikan materi-materi tentang kondisi daerah di Sulawesi Tengah.
 6. Agar perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah membuka program studi yang mengkaji tentang kebudayaan, kesenian dan bahasa daerah di Sulawesi Tengah.
- Sanjaya, W. 2007. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Alfabeta

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, 1994. *Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dedi Supriadi, 1998. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Depdikbud, (1999), *Panduan Manajemen Sekolah, Ditjen Dikdasmen*, Depdikbud, Jakarta.
- Depdiknas, (2003), *Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Depdiknas, (2005), *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- H.A.R. Tilaar, 2001. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hudojo, H. 2003. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Jalal, F, dan Supriadi, D. (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Jogjakarta: Adicita Karya Nusa.
- Jerome S. Arcaro, 2005 : *Pendidikan Berbasis Mutu*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Jiyono, dkk, (1999), *Menuju Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar*, Jakarta, Bappenas.
- Masitoh, 2007. *Kurikululum Tingkat Satuan Pendidikan*. File.upi.edu/kurikulum tingkat satuan pendidikan. Diakses tanggal 25 Agustus 2007.
- Miles dan Huberman, (1996), *Analisis data Kualitatif*, Penerbit UI Press
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Puskur Balitbang Depdiknas (2006), *Draft Panduan Pengembangan Jaringan Kurikulum Tingkat Kabupaten/Kota*
- Roestiyah NK., (1998). *Didaktik Metodik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Salman (2004) “Menenal Lebih Dekat Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)“, dalam Jurnal Swara Ditperta: No. 18 Th. II, 30 Oktober 2004